

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN 2023



RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2023

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i	
Daftar Tabel .....	ii	
Peraturan Bupati Purbalingga tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 .....	iii-xi	
<b>Bab I</b>	<b>Pendahuluan</b>	
1.1. Latar belakang .....	1-2	
1.2. Landasan hukum .....	2-5	
1.3. Maksud dan tujuan .....	5-6	
1.4. Sistematika penulisannya .....	6-7	
<b>Bab II</b>	<b>Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA OPD .....	8-22	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .....	23	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	27-29	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...	29-48	
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat. ....	62	
<b>Bab III</b>	<b>Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan .....	63	
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	63-65	
3.3 Program dan Kegiatan. ....	66-82	
<b>Bab IV</b>	<b>Rencana Kerja dan Pendanaan</b>	
Memuat Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif .....	83	
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b> .....	94

## DAFTAR TABEL

Tabel T-C 2.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA OPD .....	9-19
Tabel T-C 2-2	Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	24-26
Tabel T-C 2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	30-48
Tabel T-C 2.5	Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat. ....	62
Tabel T-C 3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah ....	64-65
Tabel T-C3.3	Program dan Kegiatan. ....	66-76
Tabel 4.1	Program Kerja& Indikator Kerja .....	85
Tabel 4.2	Kegiatan & Indikator Kegiatan .....	86-87
Tabel 4.3	Sub Kegiatan & Indikator Sub Kegiatan .....	87-93



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 139 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

#### Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
22. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-3 (tiga) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Renstra PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan Menyusun Renja PD terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;

- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - s. Dinas Pertanian;
  - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - u. Sekretariat Daerah;
  - v. Sekretariat DPRD;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Badan Keuangan Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - z. Inspektorat Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - bb. RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata;
  - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
  - dd. Kecamatan Kemangkon;
  - ee. Kecamatan Bukateja;
  - ff. Kecamatan Kejobong;
  - gg. Kecamatan Kaligondang;
  - hh. Kecamatan Purbalingga;
  - ii. Kecamatan Kalimanah;
  - jj. Kecamatan Kutasari;
  - kk. Kecamatan Mrebet;
  - ll. Kecamatan Bobotsari;
  - mm. Kecamatan Karangreja;
  - nn. Kecamatan Karanganyar;
  - oo. Kecamatan Karangmoncol;
  - pp. Kecamatan Rembang;
  - qq. Kecamatan Bojongsari;
  - rr. Kecamatan Padamara;
  - ss. Kecamatan Pengadegan;
  - tt. Kecamatan Karangjambu;
  - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal **28 Juli 2022**

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

  
HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan Kebijakan Nasional bidang pendidikan.

Tahun Anggaran 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga 2021 - 2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

Disamping itu, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 bersinergi dengan prioritas dan fokus pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya OPD menyusun Renja-OPD dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Sebagai tindak lanjut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 di atas, dan lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Renstra Kementerian Pendidikan Nasional dengan program-program Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Renja-OPD memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kaitannya dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) OPD yang disusun dengan berpedoman kepada renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 2025;
  21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



- klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Standar Pelayanan Minimal
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2009;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
  33. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
  34. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 -2026

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

#### **1.3.1 Maksud**

Rencana Kerja (Renja) 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga disusun dengan maksud untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan untuk menyusun program serta kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dengan dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Purbalingga dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga 2023 untuk menyusun rancangan awal yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam kurun waktu 1 tahun di antaranya:

1. Mendiskripsikan tentang program-program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.
2. Merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2021-2026.
3. Mengarahkan kekuatan dan peluang yang telah diidentifikasi untuk mengatasi kelemahan dan tantangan dalam suatu strategi penyelenggaraan pelayanan bidang pendidikan yang berorientasi pada hasil.
4. Menyusun program strategis yang dijabarkan berdasarkan Arah Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga dengan kewenangan Dinas sebagai dasar perencanaan program jangka menengah dan tahunan serta perencanaan kebutuhan anggaran.
5. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja Dinas dan jajarannya secara seimbang.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun dalam empat Bab:

**Bab I           Pendahuluan**

- 1.1. Berisikan latar belakang;
- 1.2. Landasan hukum;
- 1.3. Maksud dan tujuan;
- 1.4. Sistematika penulisannya.

**Bab II           Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun lalu dan Capaian RENSTRA OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan yang disampaikan oleh Masyarakat.

**Bab III         Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan.

**Bab IV         Rencana Kerja dan Pendanaan**

Memuat Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif

**BAB IV         Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2022**

---

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian Renstra**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (Tahun 2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2022). Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana Strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi Anggaran untuk SKPD.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealisasikan melalui kegiatan-kegiatan dimasing-masing program tersebut terbagi kedalam 2 (dua) kategori capaian; pertama realisasi kinerja yang kurang memenuhi dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang memenuhi target yang direncanakan pada Renja Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kabupaten Purbalingga tahun 2022 adalah yang tercantum dalam tabel berikut:

TABEL T-C.2.1

## REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022 (TAHUN BERJALAN)

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Tahun 2020	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022				
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5		6	7	8= (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
1	01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>												
1	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	100	persen	100	100	100	100	50	50	
				Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	100	persen	100	100	100	100	0	-	
				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	NA	NA	persen	100	100	100	100	50	50	
				Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	NA	NA	persen	100	100	100	100	40	40	
				Persentase pengadaan barang milik daerah	NA	NA	persen	100	100	100	100	0	-	
				Persentase pemeliharaan barang milik daerah	NA	NA	persen	100	100	100	100	40	40	
1	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			persen	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	30	30

1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja			dokumen	2	2	100	2	0	-
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKPJ, LKJIP, laporan bulanan, laporan pengendalian			dokumen	3	3	100	3	0	-
1	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas</b>			persen	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	37	37
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu			orang	4286	4384	102	5955	5801	97
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri Jumlah Operasional korwilcam			orang kali korwilcam	100 18	100 18	100	100 18	20 18	20
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer			orang	75	75	100	75	75	100
1	01	01	2.02	04	koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Terlaksananya kordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD			orang				75	75	100
1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA/LK/SPM			dokumen	5	5	100	5		-
1	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			persen	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>100</b>	1.31	1
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya penatausahaan Barang mlilik Daerah pada SKPD				0	0	-	12		-
1	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			persen	<b>100</b>	<b>90</b>	90	<b>100</b>	-	-
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat dan Bimtek			orang	12	1	8	12		-

1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan	kegiatan	5	5	100	5	-	-
1	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	persen	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	<b>34.90</b>	35
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	jenis	5	5	100	5	<b>1</b>	20
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	lusin	12	12	100	12		-
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	100	12	<b>6</b>	50
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	12	12	100	12		-
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan	12	12	100	12	<b>6</b>	50
1	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	bulan	12	12	100	12		-
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Jamuan Makanan minuman tamu dan rapat	orang kali	4016	4016	100	4016	<b>1,200</b>	30
1	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Operator pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	orang				12	<b>6</b>	50
1	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	100			
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		6	6	100			
1	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	persen	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	<b>41.67</b>	42
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko, materai, dan jasa pos/pengiriman	bulan	12	12	100	12	-	-
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	bulan	12	12	100	12	<b>5</b>	42

1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor			bulan	12	12	100	12	1	8
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa pelayanan umum Kantor (PTT)			bulan	12	12	100	12	6	50
1	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			persen	<b>100</b>	<b>100</b>	100	<b>100</b>	42.72	43
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas			kendaraan	59	32	54	59	15	25
1	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	terpeliharanya mebeulair kantor			set	1	1	100	12		-
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja terpeliharanya mebeulair kantor			unit	3	3	100	12	6	50
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor			unit	1	1	100	1	1	100
1	01	02			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,62	99,62	persen	99.7	99.7	100	99,75	0	
						Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,27	94,27	persen	95.27	95.27	100	95,77	0	
						APM PAUD	67,62	67,62	persen	73	73	100	76	0	
						Presentase PKBM yang terakreditasi	33,33	33,33	persen	55.56	55.56	100	66,67	0	
1	01	02	2.01		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	persen	<b>61.00</b>	<b>61.00</b>	100	<b>62.00</b>	5.70	9
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru /Kepala sekolah/TU	Jumlah ruang guru yang terbangun			ruang	34	34	100	2	-	-
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang terbangun			ruang	12	12	100	2	-	-



1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang terbangun	ruang	11	11	100	11	-	-
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang terbangun	ruang	34	26	76	34	-	-
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab	ruang	12	12	100	12	-	-
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang diadakan	set	203	208	102	203	-	-
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan					13		-
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah AUSTS yang terfasilitasi	orang	1479	1567	106	1479	-	-
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	Jumlah alat praktik dan alat peraga yang diadakan	unit	50	63	126	50	-	-
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah	orang	13210	13210	100	13210		-
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan kurikulum sekolah	orang	150	469	313	150	75	50
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan	lomba	9	6	67	9	-	-
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns tingkat SD	orang	2557	2099	82	2625	2,625	100
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi	orang	90	73	81	90	-	-
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dibina	orang	18	260	1,444	18	-	-
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah peserta didik sekolah dasar	sekolah	515	465	90	515	-	-
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah sekolah dasar yang difasilitasi	kegiatan	3	3	100	3	-	-
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang terbangun	ruang	32	5	16	32	-	-

1	01	02	2.02		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	60.00	60.00		61.00	61.00	100	62.00	6.28	10
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang dibangun			ruang	4	0	-	4		-
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun				0			2	-	-
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun			ruang	1	1	100	3	-	-
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun			ruang	2	1	50	2	-	-
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang dibangun			ruang	14	14	100	2	-	-
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun			ruang	19	18	95	19	-	-
1	01	02	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah yang direhab							1		-
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang direhab			ruang	25	20	80	25	-	-
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang direhab			ruang	5	3	60	5	-	-
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab			ruang	4	4	100	4	-	-
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan yang direhab			ruang	9	3	33	9	-	-
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang direhab			ruang	40	2	5	40	-	-
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarpras dan utilitas sekolah yang terbangun			ruang	18	18	100	8	-	-
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Meubeler Sekolah	Jumlah Meubeler sekolah yang diadakan			ruang	8	8	100			
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perengkapan sekolah	Jumlah perlengkapan sekolah yang diadakan							166		-

1	01	02	2.02	3 2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah penerima PIP yang didampingi			sekolah	60	60	100	60	-	-
1	01	02	2.02	3 5	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	Jumlah alat praktik dan alat peraga yang disalurkan			set	40	97	243	40	-	-
1	01	02	2.02	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah sekolah yang mengikuti ujian sekolah			siswa	29,706	18,500	62	29,706	-	-
1	01	02	2.02	3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta bimbingan teknis penyusunan kurikulum sekolah model			kegiatan	76	6	8	76	-	-
1	01	02	2.02	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan			lomba	7	3	43	7	-	-
1	01	02	2.02	3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns tingkat SMP			orang	1,854	1,017	55	1,854	100	5
1	01	02	2.02	4 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi			kegiatan	2	2	100	2	-	-
1	01	02	2.02	4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kelembagaan dan manajemen sekolah yang di bina				60	-	-	60	-	-
1	01	02	2.02	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Satap yang mendapat BOS			unit	96	96	100	-	-	-
1	01	02	2.02	4 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP Satap yang mendapat BOS Damping			ruang	6	11	183	6	6	100
1	01	02	2.02	4 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang direhab			ruang	3	1	33	3	-	-
1	01	02	2.02	4 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang kepala sekolah yang direhab			ruang	2	1	50	2	-	-
1	01	02	2.03		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persentase PAUD terakreditasi minimal B</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	persen	<b>50.10</b>	<b>74.00</b>	148	<b>50.50</b>	-	-
1	01	02	2.03	0 1	Pembangunan Gedung/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang dibangun			ruang				1	-	-

1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun			ruang	28	28	100	9	-	-
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab			ruang	2	2	100	2	-	-
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah rehab sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD			ruang				12	-	-
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD			lembaga	6	6	100	50	-	-
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah PAUD yang menyelenggarakan proses belajar			unit	1	1	100	1	-	-
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns			orang	1703	1558	91	1703	800	47
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah peserta pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan			orang	3712	3712	100	120	-	-
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah kelembagaan dan manajemen PAUD yang di bina			kegiatan	2	3	150	2	-	-
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD penerima BOP			PAUD	644	636	99	644	-	-
1	01	02	2.04		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi</b>	50.00	50.00	persen	50.10	38.89	78	50.50	-	-
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ruang belajar KBM yang direhab			ruang	1	1	100	1	-	-
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga yang mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan			lembaga	18	10	56	2756	-	-
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah PKBM yang dibina			lembaga	18	18	100	18	-	-

1	01	02	2.04	1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga yang mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan			orang	2756	1523	55	2756	-	-
1	01	04			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	1 Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	18,85	18,85	persen	16.73	16.73	100	14,62	0	-
1	01	04	2.01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	Cakupan PTK bersertifikat	80.50	80.50	persen	80.50	80.04	99	81.00	0	-
1	01	04	2.01	0 2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Seleksi Calon Kepala Sekolah			orang	150	149	99	150	0	-
					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>										
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>										
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)	6	6		6	6	100	7	2	29
2	22	02	2.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	6	6		6	6	100	6	-	-
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah kegiatan pelindungan pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan			kegiatan	2	2	100	2		-
2	22	02	2.01	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Fasilitasi Dewan Kesenian dan PEPADI Jumlah Fasilitasi Organisasi Kesenian Lain Jumlah Pengelolaan Panggung Mahesa Jenar			kegiatan	6	6	100	2	-	-

2	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi							2	2	100	15	17	113
2	22	02	2.02	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Fasilitas Pentas Seni dan Budaya Jumlah Festival dan Pentas Jumlah Revitalisasi Kesenian Tradisional				kegiatan			2	2	100	32	10	31
2	22	02	2.02	0 2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah lembaga pranata tradisional yang dibina				kegiatan			4	3	75	4		-
2	22	02	2.03		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	<b>100</b>	<b>100</b>					100	100	100	100	100	100
2	22	02	2.03	0 1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat yang difasilitasi				kegiatan			1	1	100	1	1	100
2	22	04			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>1 Persentase sejarah lokal yang dilestarikan</b>	<b>70</b>	<b>70</b>					<b>70</b>	<b>70</b>	100	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
2	22	04	2.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan							3	3	100	3	1	33
2	22	04	2.01	0 1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				kegiatan			3	3	100	3	1	33
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>1 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarkan</b>	<b>15</b>	<b>15</b>					<b>15</b>	<b>15</b>	100	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>113</b>
2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan</b>							7	7	100	7	2	29
2	22	05	2.01	0 2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah penetapan cagar budaya				cagar			7	4	57	7	2	29
2	22	05	2.02		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah cagar budaya yang dikelola</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	100	<b>1</b>	-	-
2	22	05	2.02	0 1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi				cagar			3	3	100	3	-	-

2	22	05	2.02	0 3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimanfaatkan			kegiatan	3	3	100	1	-	-
2	22	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>1 Persentase benda koleksi museum yang dikelola</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	50	50
2	22	06	2.01		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	cakupan pengunjung museum				220	220	100	220	-	-
2	22	06	2.01	0 1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	jumlah koleksi yang di kelola Jumlah koleksi yang dikonservasi			Koleksi Cagar	1182 100	1182 100	100	1182 100	-	-
2	22	06	2.01	0 3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pengunjung museum			orang	21938	21938	100	21938	-	-
2	22	06	2.01	0 4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang terpelihara			museum	3	3	100	3	-	-
										-	-		-	-	-

Dari tabel diatas terdapat beberapa hasil evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indicator hasil (outcome) yang terealisasikan melalui kegiatan-kegiatan dimasing-masing program tersebut terbagi kedalam 2 (dua) kategori capaian; pertama realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target.

Kedua kategori capaian tersebut dan penunjang.

- 1) Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan:
  - a. Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi dari target 100,00% terealisasi 25.00%;
  - b. Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi dari target 89,00% terealisasi 38.89%;
  - c. Jumlah pendidik / tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional dari target 8 orang terealisasi 2 orang;
  - d. Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan minimal D.IV/ dari target 100,00% terealisasi 78.56%;
  - e. Presentase sertifikat pendidik dari target 100,00% terealisasi 60.24 %
  - f. Presentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG) dari target 100,00% terealisasi 0.00 %
- 2) Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
  - a. Angka Partisipasi Kasar PAUD sederajat 100,00% terealisasi 164.71 %;
  - b. Cakupan Guru PAUD memenuhikualifikasi dari target 43.00% terealisasi 54,36 %;
  - c. Angka Partisipasi Kasar SD sederajat 109,99% terealisasi 112.32 %;
  - d. Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat dari target 100,30% terealisasi 136.80 %;
  - e. Angka partisipasi murni SD dari target 91,40% terealisasi 100.03%;
  - f. Angka partisipasi murni SMP dari target 70,14% terealisasi 115.33%;
  - g. Persentase Satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah dari target 100% terealisasi 100%;
  - h. Persentase Akreditasi PAUD dari target 45% terealisasi 74%;
  - i. Persentase Akreditasi SD/ sederajat dari target 45% terealisasi 94.33%;
  - j. Persentase angka kelulusan SD/ sederajat dari target 100.00% terealisasi 99.98%;
  - k. Persentase angka kelulusan SMP/ sederajat dari target 100.00% terealisasi 100.00%;



- l. Angka melanjutkan SD/ sederajat dari target 86.07% terealisasi 100.00%;
  - m. Angka putus sekolah SD/ sederajat dari target 0.17% terealisasi 1.04%;
  - n. Angka putus sekolah SMP/ sederajat dari target 0.69% terealisasi 0.97%;
  - o. Angka mengulang SD/ sederajat dari target 4.8% terealisasi 1.66%;
  - p. Angka mengulang SMP/ sederajat dari target 0.2% terealisasi 0.26%;
  - q. Kelayakan guru mengajar SMP dari target 100% terealisasi 100%;
  - r. Kelayakan guru mengajar dari target 100% terealisasi 100%;
- 3) Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan pada masing-masing kategori diatas secara umum antara lain adalah:
- a. Untuk indikator kinerja yang realisasinya dibawah target disebabkan antara lain adalah:
    - 1. Pada program pendidikan non formal antara lain adalah: (a) Untuk tahun ini baru mendaftar ke Badan Akreditasi Nasional, untuk pelaksanaan akreditasi menunggu Badan Akreditasi Nasional
    - 2. Sedangkan pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan antara lain adalah: (a) Baru ada 2 orang yang menjuarai lomba di tingkat nasional dan di tingkat provinsi yaitu Juara Pengawas tingkat nasional dan juara KTU Juara di TK Provinsi; (b) tenaga pendidikan yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan yang linier lebih sedikit dari jumlah tenaga pendidik seluruhnya; (c) tenaga pendidik yang sudah memiliki sertifikat pendidik lebih sedikit dari jumlah tenaga pendidik seluruhnya.
  - b. Sementara capaian indikator kinerja yang melebihi target didukung antara lain:
    - 1. Adanya kebijakan sekolah gratis lewat program BOS;
    - 2. Rata-rata SD dan SMP sudah menerapkan SPM dalam hal jumlah siswa perkelas;
    - 3. Program sertifikasi mendorong guru aktif memenuhi syarat-syarat akademis dan portofolio sesuai dengan tuntutan peraturan yang berlaku.
- 4) Implikasi terhadap capaian program dalam renstra
- Dengan capaian kinerja pada 2021 yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu capaian yang tidak sesuai target dan capaian yang melebihi target, maka implikasi terhadap potensi capaian kinerja program dan kegiatan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut: Bagi program dan kegiatan yang capaian kinerja dibawah target pada 2021, kemungkinan pada tahun 2022 akan terulang kondisi yang sama, yaitu target kinerja untuk indikator yang sama tidak akan tercapai sebagaimana yang

ditetapkan dalam dokumen renstra. Sebaliknya untuk program dan kegiatan yang melebihi target, maka di Tahun 2022 diperkirakan mengalami kenaikan capaian. Oleh karena itu untuk menetapkan target kinerja pada tahun 2022 harus ada penyesuaian angka indikator dimasing-masing program kegiatan.

- 5) Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Untuk mengoptimalkan capaian target kinerja sasaran pada program-program unggulan, harus ada upaya perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap capaian kinerja hasil dimasing-masing program seperti pembangunan RKB, rehabilitas ruang kelas, pengadaan alat laboratorium. Pada tahun 2021, ada kegiatan / pembangunan fisik yang pelaksanaannya tertunda ke tahun anggaran berikutnya akibat perencanaan yang kurang matang. Hal ini banyak terjadi pada kegiatan-kegiatan yang bersumber pada anggran Non APBD, yaitu APBN / DAK. Selain kegiatan fisik, kegiatan non fisik seperti sertifikasi guru, peningkatan kualifikasi dan rekrutmen guru baru, perlu diupayakan lebih optimal lagi untuk percepatan pemenuhan target-target Renstra diperiode 5 (lima) tahun berikutnya.

## 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat dari 2 parameter, yaitu:

- (1) Berdasarkan tingkat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud Nomer 23 Tahun 2013;
- (2) Berdasarkan indikator kinerja kunci sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomer 6 /2008

Capaian kinerja pelayanan berdasarkan data pada tabel dibawah membawa implikasi terhadap kebutuhan pengembangan program / kegiatan Tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada program wajib belajar pendidikan dasar perlu upaya: (1) perluasan sarana penunjang kegiatan belajar, seperti ruang Laboratorium IPA lengkap dengan peralatannya, terutama untuk sekolah swasta, baik untuk sekolah maupun madrasah; (2) Penugasaan guru sesuai kualifikasi yang disyaratkan; (3) Penambahan kuota calon peserta sertifikasi guru melalui usulan ke Kemendikbud; (4) Pengalokasian anggaran beasiswa bagi guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SI; (5) Perluasan daya tamping melalui penambahan RKB , USB, pendirian sekolah-sekolah alternatif; (6) BSM (7) Perluasan sasaran rehabilitasi ruang kelas.

Gambaran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dapat dilihat pada table 2.3 dibawah ini:

Tabel T-C.2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Angka Harapan Lama Sekolah		11,99	11,99	12,01	12,10	12,25	12,00	-	12,10	12,25	
2	Persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari (UU No 5 pasal 5 10 OPK tahun 2017 ttg pemajuan kebudayaan dan cagar budaya (UU No 11 Tahun 2010)		63,64	63,64	64	72,7	72,7	NA	-	72,7	72,7	Untuk Indikator Tahun 2021 masih menggunakan Indikator RPJMD periode sebelumnya
3	Nilai SAKIP DINDIKBUD		69,01	69,01	70,01	70,51	71,01	B	-	70,51	71,01	
4	Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun Dikdas (SD)		99,62	99,62	99,7	99,75	99,8	NA	-	99,75	99,8	
5	Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun Dikdas (SMP)		94,27	94,27	95,27	95,7	96,27	NA	-	95,7	96,27	
6	Angka Partisipasi Kasar PAUD		83	83	86	89	92	164,71	-	89	92	

7	Persentase Obyek Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sesuai Perbup No.430/400 tahun 2018 yang dilestarikan atau dikembangkan		60	60	60	70	70	-	70	70	Untuk Indikator Tahun 2021 masih menggunakan Indikator RPJMD periode sebelumnya	
8	Persentase cagar budaya yang dilestarikan		15	15	15	15	15	-	15	15	Untuk Indikator Tahun 2021 masih menggunakan Indikator RPJMD periode sebelumnya	
9	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Data Realisasi capaian 2022 belum tersedia
10	Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Data Realisasi capaian 2022 belum tersedia

11	Indikatornya adalah jumlah warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Data Realisasi capaian 2022 belum tersedia
12	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	Data Realisasi capaian 2022 belum tersedia

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa capaian kinerja program-program pokok dalam bentuk indikator hasil (outcome) yang terealisasi melalui kegiatan-kegiatan dimasing-masing program tersebut terbagi kedalam 2 (dua) kategori capaian; pertama realisasi kinerja yang kurang dari target, kedua realisasi capaian kinerja yang melebihi target. Untuk realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi, Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi, Jumlah pendidik / tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional, Persentase tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan minimal D.IV, Presentase sertifikat pendidik, Presentase pendidik lulus Uji Kompetensi Guru (UKG). Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja adalah Angka Partisipasi Kasar PAUD sederajat, Cakupan Guru PAUD memenuhikualifikasi, Angka Partisipasi Kasar SD sederajat, Angka Partisipasi Kasar SMP sederajat, Angka partisipasi murni SD, Angka partisipasi murni SMP, Persentase Satuan pendidikan yang menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah, Persentase Akreditasi PAUD, Persentase Akreditasi SD/sederajat, Persentase angka kelulusan SD/sederajat, Persentase angka kelulusan SMP/sederajat, Angka melanjutkan SD/sederajat, Angka putus sekolah SD/sederajat, Angka putus sekolah SMP/sederajat, Angka mengulang SD/sederajat, Angka mengulang SMP/sederajat, Kelayakan guru mengajar SMP

Dampak kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap NSPK, SPM, dan SDGs akan menjadi baik.

Program Unggulan (Pemerintah) misi 4. di tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kesejahteraan untuk GTT dan PTT
2. Penanganan AUSTS
3. Pembangunan Gedung Kesenian

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan pendidikan di Purbalingga yang dihadapi, tantangan, peluang dan potensi pembangunan yang dapat

dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan pendidikan di Purbalingga melalui berbagai pertimbangan, antara lain :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran,
2. Luasnya dampak yang ditimbulkan,
3. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan pendidikan,
4. Kemudahan untuk dikelola.

Isu-isu strategis tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program strategis sebagai dasar dalam pembentukan dan pengembangan potensi anak usia emas (*golden age*). Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga berkomitmen untuk lebih meningkatkan sarana prasarana, kurikulum dan potensi siswa PAUD. Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai lembaga PAUD yang sesuai standar sehingga APK PAUD tahun 2021 yang sudah mencapai 164.71% akan terus tetap baik atau meningkat lagi.

2. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas Pendidikan Dasar (Dikdas)

Meskipun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun telah berhasil dicapai dengan APK SD 112.32% dan APK SMP sebesar 136.80%, namun kualitas sarana prasarana belum memadai khususnya jenjang SD/MI. Sampai dengan tahun 2021 persentase ruang kelas yang baik baru mencapai 85,14% bahkan yang rusak berat dan ringan mencapai 14,86%, disamping itu penerapan kurikulum merdeka belajar harus segera dilaksanakan.

3. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam Pelayanan Pendidikan Non Formal.

Program Pendidikan Non Formal dititik beratkan pada layanan Pendidikan Masyarakat, khususnya yang terkait dengan Pembinaan Lembaga Kursus, Penuntasan Buta Aksara dan lain-lain. Program Penuntasan Buta Aksara di Purbalingga sudah menggembirakan, karena berdasarkan data, jumlah penduduk yang melek huruf sudah mencapai 100 %, dari target 99, 59 %

4. Sudah meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sampai saat ini



kualifikasi pendidik masih rendah khususnya Guru SD baru mencapai 97,43% dan Guru TK baru mencapai 62,33%. Disamping itu persentase pendidik yang bersertifikat juga masih rendah khususnya Guru SD baru mencapai 99.66% dan Guru TK baru mencapai 100%.

5. Belum optimalnya kepastian dalam pembinaan pendidikan karakter.

Berdasarkan tayangan media massa pada akhir-akhir ini, sering dipertontokan perilaku menyimpang oleh para pelajar kita, diantaranya : tawuran antar pelajar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perilaku sex menyimpang dan lain-lain, sungguh sangat memprihatinkan dan perlu penanganan yang serius. Disamping itu budaya sopan santun anak-anak kita mulai menurun, sehingga perlu ditingkatkan pembinaan karakter bagi pelajar melalui para pendidik di tingkat SD,SMP di Jawa Tengah.

6. Masih terbatasnya ketersediaan dan kesetaraan Pendidikan Khusus (Dikus). Berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa Pendidikan Khusus (Dikus) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

7. Masih terbatasnya kualitas/tenaga *skill* dibidang kebudayaan, ketidak adanya pandang budaya disetiap kecamatan, kurang akurat dan sedikitnya data, belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi dan belum optimalnya koordinasi dengan dinas terkait baik dalam maupun luar daerah.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan rencana awal menggunakan rancangan awal dari masing-masing bidang ditambah dengan hasil musrenbang tingkat kecamatan. Dalam Proses perencanaan kita mengevaluasi hasil musrenbang dari kecamatan dengan melihat prioritas usulan dan besarnya anggaran, sepanjang masih bisa masuk plafon anggaran akan kita masukkan sebagai rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena keterbatasan anggaran yang ada di SKPD Dinas Pendidikan maka banyak sekali rencana yang berasal dari musrenbang tingkat kecamatan tidak bisa di akomodir dalam renja SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tabel review dapat dilihat pada table 2.4 dibawah ini:

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				730,098,183,500	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				798,262,963,000	
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				726,108,833,500	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>				794,599,813,000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				545,313,625,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				590,025,728,000	
			1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 Persen	10,525,000			1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	10,525,000	
			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 Persen	542,644,703,000			2 Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen	587,971,690,000	
			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	1,859,375,000			3 Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	1,187,251,000	
			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 Persen	396,002,000			4 Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100 persen	453,242,000	
			5 Persentase pengadaan barang	100 persen	30,000,000			5 Persentase pengadaan barang	100 persen	30,000,000	

			milik daerah					milik daerah			
			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	373,020,000			6 Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	373,020,000	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b> Persen	<b>10,525,000</b>			<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100</b> persen	<b>10,525,000</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,525,000			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5,525,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5,000,000			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5,000,000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	<b>100</b> Persen	<b>542,644,703,000</b>			<b>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas</b>	<b>100</b> persen	<b>587,971,690,000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4286 Orang/bulan	541,525,290,000			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4286 Orang/bulan	586,852,277,000	gaji, tunjangan pns dan p3k, tamsil
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	786,658,000			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	786,658,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	332,755,000			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	332,755,000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b> Persen	<b>396,002,000</b>			<b>Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b> persen	<b>453,242,000</b>	

	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	396,002,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	453,242,000	Usulan tambah anggaran untuk menambah jumlah bulan pembantu pengurus barang di korwilcam dan SD yang semula 10 bulan menjadi 12 bulan dengan tambahan anggaran 57juta ( 459 orang di SD dan 18 orang di korwilcam @ 75ribu x 12 bulan)
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b> Persen	<b>688,700,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100</b> persen	<b>488,700,000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	688,700,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	488,700,000	anggaran DBHCHT (300juta) untuk Pagelaran wayang; festival Jensud; HUT Purbalingga; dan usulan menggunakan anggaran DAU untuk Peningkatan Kapasitas ke Bandung 188,7 juta
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	<b>100</b> Persen	<b>128,282,000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	<b>100</b> persen	<b>134,874,000</b>	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,495,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5,495,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80,832,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	77,424,000	atk, peralatan kebersihan, bbm genset dan mesin potong rumput, isi tabung gas, isi pemadan, tanaman, karangan bunga, obat-obatan, cenderamata, fotocopy, jilid, cetak, air galon, materi. Tambahan untuk alat kebersihan yang sebelumnya tidak ada. kebanyakan tambahan untuk bahan dan alat kebersihan yang di tahun 2022 tidak dianggarkan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2,400,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	29,955,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	39,955,000	jamuan rapat
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	9,600,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	9,600,000	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan</b>	100 Persen	30,000,000	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan</b>	100 persen	30,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	30,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	1,042,393,000	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	563,677,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3,600,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154,260,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	154,260,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	17,425,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	17,425,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	867,108,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	388,392,000	THL 18 Orang (8 bid Kebudayaan, 10 urusan pendidikan) dan BPJS Kesehatan, JKK, JKM
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			100	373,020,000	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			100	373,020,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	257,220,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit	257,220,000	

	Lapangan					Operasional atau Lapangan				
	Pemeliharaan Mebel				10,000,000	Pemeliharaan Mebel			10,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		32,750,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	32,750,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		73,050,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	73,050,000	
	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>				180,481,905,000	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>			204,307,496,000	
		1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,75		109,436,578,000		1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,75	135,897,507,000	
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,77		41,060,966,000		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95,77	41,143,869,000	
		3. APM PAUD	76		25,501,787,000		3. APM PAUD	76	23,127,746,000	
		4. Presentase PKBM yang terakreditasi	66,67		4,482,574,000		4. Presentase PKBM yang terakreditasi	66,67	4,138,374,000	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD</b>	<b>62.00</b>		<b>109,436,578,000</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD</b>	<b>62.00</b>	<b>135,897,507,000</b>	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang		398,742,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	15 Ruang	398,742,000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang		604,482,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	604,482,000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	11 Ruang		2,572,739,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang	11 Ruang	2,572,739,000	

							Telah Dibangun				
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	3,328,880,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	3,328,880,000		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang	3,934,337,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang	3,934,337,000		
	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				1,575,000,000	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1,575,000,000		
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah				1,575,000,000	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah			1,575,000,000		
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				320,000,000	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			320,000,000		
	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	203 Paket	201,000,000	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	203 Paket	212,850,000		pengadaan meja 300 buah@390ribu dan kursi 300 buah@280ribu
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1850 Peserta Didik	1,554,330,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1850 Peserta Didik	1,240,000,000		Bansos AUSTS, pendampingan dan pembinaan. Tahun 2022 anggaran AUSTS sebesar 400juta digesera ke BAPPEDA, tahun 2023 anggaran dikembalikan ke DINDIKBUD. Sehingga nilai anggaran bertambah sama seperti tahun 2021



	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	120 Paket	9,938,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	120 Paket	39,303,000,000	1.Pengadaan 70 paket TIK @125juta ( chrome book) (DAK)2. Pengadaan media pendidikan 20 paket@45juta (DAK). 3. menindaklanjuti MoU Bupati dengan Dirjen PAUD, Dasar dan menengah untuk mendukung program sekolah penggerak di level SD maka dilakukan sharing pendanaan berupa pengadaan laptop untuk digitalisasi ke 24 SD sekolah penggerak--> 24@12juta (dana DAU)
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	12400 Satuan Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	12400 Satuan Pendidikan		
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	469 Satuan Pendidikan	200,382,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	469 Satuan Pendidikan	220,420,000	Bintek Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), pengimbasan sekolah penggerak ke 120 Sekolah lain ( 1 sekolah penggerak mengimbas 5 sekolah lain)

											dalam bentuk sosialisasi
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	9 Peserta Didik	157,530,000		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9 Peserta Didik	157,530,000		
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2089 Orang	11,747,772,000		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2089 Orang	14,087,466,000		Honor GTT MI 170 orang, GTT SD non SK 566 orang, GTT SD SK Bupati 838 orang, GTT SD Swasta 17 orang, PTT Korwil 34 orang, PTT SD 558 orang (sebelum perhitungan P3K) dan BPJS kesehatan 120ribu per orang X 838 orang x 12 bulan, dan BPJS ketenagakerjaan JKK 8ribu x 838 orang x 12 bulan, JKM 9ribu x 838 x 12 bulan. Pertambahan Anggaran dari tahun 2022 untuk menambah kenaikan honnor GTT/PTT yang bertambah masa kerja, dan yang sudah mencapai 1 tahun.

			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	35,394,000		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar													Diklat guru dan Diklat untuk kepala sekolah lama maupun baru yang dilaksanakan DINDIKBUD. Kepala Sekolah yang ditunjuk dengan syarat guru penggerak, sudah mengikuti diklat guru penggerak selama 6 bulan, namun materi tentang manajemen, supervisi dan ketatausahaan sekolah belum ada sehingga membutuhkan tambahan kemampuan terkait manajemen, leadership dan regulasi sekolah melalui diklat ini
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	469 Satuan Pendidikan	64,460,000		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah													
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	469 Satuan Pendidikan	65,423,000,000		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	469 Orang	910,868,000		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar													

	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	32 Ruang	4,894,662,000	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	32 Ruang		
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	62.00	<b>41,060,966,000</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	62.00	<b>41,143,869,000</b>	
	Penambahan Ruang Kelas Baru				2,375,000,000	Penambahan Ruang Kelas Baru				2,500,000,000	Pembangunan lanjutan SMP N 1 Karangjambu, sampe selesai dan sudah operasional.
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	450,256,000	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	450,256,000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	1,062,520,000	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang	1,062,520,000	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,319,208,000	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	1,319,208,000	
	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	499,700,000	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	499,700,000	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	1,917,220,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	1,917,220,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	10,524,703,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	10,524,703,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,137,130,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang	1,371,130,000	

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	76,164,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	76,164,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	927,864,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	927,864,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6,074,810,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang	6,074,810,000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	1,021,492,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Unit	1,021,492,000	
	Pengadaan Mebel sekolah					Pengadaan Mebel sekolah				152,000,000	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	77 Peserta Didik	18,425,000	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	77 Peserta Didik	18,425,000	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	86 Paket	2,439,000,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	86 Paket	2,439,000,000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	20,688 Peserta Didik	200,000,000	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	20,688 Peserta Didik	264,600,000	PPDB (bekerjasama dengan Telkom yang disempurnakan) untuk 55 sekolah negeri x @4,520 juta = 248,6 juta
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	20 Satuan Pendidikan	374,500,000	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan	20 Satuan Pendidikan	191,950,000	

			Rekomendasi					Rekomendasi			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	9 Peserta Didik	276,950,000		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	9 Peserta Didik	276,950,000	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,200 Orang	4,838,790,000		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,200 Orang	4,542,942,000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	360 Orang	93,500,000		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	360 Orang	93,500,000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	77 Satuan Pendidikan	145,275,000		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	77 Satuan Pendidikan	142,215,000	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	6 Satuan Pendidikan	3,787,026,000		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	6 Satuan Pendidikan	3,830,225,000	BOS satap dan BOS SMP Swasta
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77 Orang	74,282,000		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	77 Orang	19,844,000	

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1,239,473,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU		Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1,239,473,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	187,678,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah		Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	187,678,000
	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>Persentase PAUD terakreditasi minimal B</b>	<b>50.50</b>	<b>25,501,787,000</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>Persentase PAUD terakreditasi minimal B</b>	<b>50.50</b>	<b>23,127,746,000</b>
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	220,782,000	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	168,282,000
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	40 Unit	891,717,000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	40 Unit	891,717,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	53,141,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	53,141,000
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1,430,000,000	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	1,430,000,000
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	171,250,000	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	2 Paket	171,250,000
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Peserta Didik	28,715,000	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1 Peserta Didik	28,715,000
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1555 Orang	10,829,172,000	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1555 Orang	8,831,928,000

	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	370 0 Orang	120,213,000	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3700 Orang	120,213,000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	440,797,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1 Satuan Pendidikan	141,500,000
	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	11,316,000,000	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	500 Satuan Pendidikan	11,291,000,000
	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>		<b>Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi</b>	50.5 0	<b>4,482,574,000</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan</b>		<b>Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi</b>	50.50	<b>4,138,374,000</b>
	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	300 Peserta Didik	300,462,000	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	300 Peserta Didik	300,462,000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	38 Satuan Pendidikan	265,812,000	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	38 Satuan Pendidikan	247,812,000
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	38 Satuan Pendidikan	3,916,300,000	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	38 Satuan Pendidikan	3,590,100,000
	<b>PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>1 Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20</b>	81.0 0	<b>313,303,500</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>1 Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20</b>	81.00	<b>266,589,000</b>



	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		Cakupan PTK bersertifikat		<b>313,303,500</b>	<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		Cakupan PTK bersertifikat		<b>266,589,000</b>		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2	Laporan	313,303,500	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	2	Laporan	266,589,000
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>3,150,456,500</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					<b>2,837,456,500</b>	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		<b>1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)</b>	7		1,841,462,000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		<b>1 Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)</b>	7		1,541,462,000
	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	6		<b>1,450,722,000</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	6		<b>1,150,722,000</b>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		Objek	415,828,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		Objek	115,828,000

	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2 Orang	1,034,894,000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2 Orang	1,034,894,000
	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	<b>370,740,000</b>	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	<b>370,740,000</b>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	370,740,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	6 Objek	370,740,000
	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	100	<b>20,000,000</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		persentase Jumlah lembaga adat yang dibina	100	<b>20,000,000</b>
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	20,000,000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	20,000,000
	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>1 Persentase sejarah lokal yang dilestarikan</b>	<b>70</b>	<b>76,032,000</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>1 Persentase sejarah lokal yang dilestarikan</b>	<b>70</b>	<b>76,032,000</b>
	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	3	<b>76,032,000</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	3	<b>76,032,000</b>

	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2 Orang	76,032,000	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2 Orang	76,032,000
	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>		<b>1 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarikan</b>	<b>15</b>	<b>392,610,500</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>		<b>1 Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarikan</b>	<b>15</b>	<b>379,610,500</b>
	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>7</b>	<b>86,920,500</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan</b>	<b>7</b>	<b>73,920,500</b>
	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	7 Objek	86,920,500	Penetapan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	7 Objek	73,920,500
	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>jumlah cagar budaya yang dikelola</b>	<b>1</b>	<b>305,690,000</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>		<b>jumlah cagar budaya yang dikelola</b>	<b>1</b>	<b>305,690,000</b>
	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	214,513,000	Pelindungan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	3 Objek	214,513,000
	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	91,177,000	Pemanfaatan Cagar Budaya		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1 Objek	91,177,000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>		<b>1 Persentase benda koleksi museum yang dikelola</b>	<b>100</b>	<b>840,352,000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>		<b>1 Persentase benda koleksi museum yang dikelola</b>	<b>100</b>	<b>840,352,000</b>
	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>		cakupan pengunjung museum	220	<b>840,352,000</b>	<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>		cakupan pengunjung museum	220	<b>840,352,000</b>
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	98,375,000	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit	98,375,000

	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	8 Orang	644,301,000	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman		Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	8 Orang	644,301,000	
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit	97,676,000	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit	97,676,000	
	<b>Jumlah Total</b>				<b>729,259,290,000</b>					<b>797,437,269,500</b>	

RENCANA KERJA AKHIR PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		Bidang Pengampu
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
1	1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			757.715.364.000				778.336.170.000	
1	1	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	2.490.000			100 persen	2.490.000
				Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100 persen	581.210.743.000			100 persen	581.210.743.000
				Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	1.112.420.000			100 persen	1.127.020.000
				Persentase pengelolaan administrasi aset milik	100 persen	188.107.000			100 persen	188.107.000



1	1	1	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dindikbud	250 kegiatan	485.000.000	DBH CHT		100 orang	485.000.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>		<b>100 persen</b>	<b>51.991.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>66.591.000</b>	
1	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dindikbud	1 paket	2.280.000	DAU		2 paket	2.280.000	
1	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dindikbud	3 paket	32.133.000	DAU		10 paket	32.133.000	
1	1	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dindikbud	1 dokumen	996.000	DAU		6 dokumen	996.000	
1	1	1	2,06	8	Fasilitas Jamuan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dindikbud					5 laporan	5.000.000	
1	1	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dindikbud	12 laporan	16.582.000	DAU		6 laporan	16.582.000	
1	1	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dindikbud	orang	-	DAU		2 dokumen	9.600.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan</b>		<b>100 persen</b>	<b>12.451.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>12.451.000</b>	
1	1	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dindikbud	3 unit	12.451.000	DAU		2 unit	12.451.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 persen</b>	<b>575.429.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>575.429.000</b>	

1	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dindikbud	1 laporan	801.000	DAU		2 laporan	801.000	
1	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dindikbud	12 laporan	175.404.000	DAU		8 laporan	175.404.000	
1	1	1	2,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dindikbud	2 laporan	7.232.000	DAU		2 laporan	7.232.000	
1	1	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dindikbud	12 laporan	391.992.000	DAU		12 laporan	391.992.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 persen</b>	<b>271.628.000</b>			<b>100 persen</b>	<b>271.628.000</b>	
1	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dindikbud	60 unit	210.042.000	DAU		60 unit	210.042.000	
1	1	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dindikbud	3 unit	17.742.000	DAU		30 unit	17.742.000	
1	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dindikbud	1 unit	43.844.000	DAU		1 unit	43.844.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>		<b>99,75 persen</b>	<b>123.245.567.000</b>			<b>99,75 persen</b>	<b>114.712.673.000</b>	
						<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>		<b>95,77 persen</b>	<b>23.646.826.000</b>			<b>95,77 persen</b>	<b>52.255.126.000</b>	



						<b>APM PAUD</b>		<b>76</b>	<b>perse</b> <b>n</b>	<b>23.095.544.</b> <b>000</b>			<b>76</b>	<b>persen</b>	<b>23.626.344.</b> <b>000</b>		
						<b>Presentase PKBM yang terakreditasi</b>		<b>66.6</b>	<b>perse</b> <b>n</b>	<b>4.818.947.0</b> <b>00</b>			<b>66.6</b>	<b>persen</b>	<b>4.818.947.0</b> <b>00</b>		
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2,01</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD</b>		<b>62</b>	<b>perse</b> <b>n</b>	<b>123.245.567</b> <b>.000</b>			<b>62</b>	<b>persen</b>	<b>114.712.673</b> <b>.000</b>		
1	1	2	2,01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Dindikbud	18	ruang	4.276.272.000	DAK Fisik		28	ruang	4.276.272.000		
1	1	2	2,01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Dindikbud	25	ruang	2.015.225.000	DAK Fisik		13	ruang	2.015.225.000		
1	1	2	2,01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Dindikbud	12	ruang	2.635.926.000	DAK Fisik		18	ruang	2.635.926.000		
1	1	2	2,01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Dindikbud	34	paket	5.362.166.000	DAK Fisik - DAU		32	unit	5.362.166.000		
1	1	2	2,01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Dindikbud	103	ruang	17.974.245.000	DAK Fisik - DAU - BAN GUB		74	ruang	8.353.013.000		
1	1	2	2,01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dindikbud	1	ruang	120.975.000	DAK Fisik		1	ruang	120.975.000		
1	1	2	2,01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dindikbud	1	ruang	115.526.000	DAK Fisik		1	ruang	115.526.000		
1	1	2	2,01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Dindikbud	7	paket	592.678.000	DAK Fisik - DAU		7	unit	592.678.000		

1	1	2	2,01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Dindikbud	48 paket	-	DAU		48 paket	1.088.338.000	
1	1	2	2,01	17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Perlengkapan siswa	Dindikbud							
1	1	2	2,01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Dindikbud	1568 peserta didik	1.655.629.000	DAU		1568 peserta didik	1.103.874.000	
1	1	2	2,01	22	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Dindikbud	32 paket	4.119.277.000	DAK Fisik - DAU		32 paket	4.119.277.000	
1	1	2	2,01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Dindikbud	469 satuan pendidikan	82.164.000	DAU		469 satuan pendidikan	82.164.000	
1	1	2	2,01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Dindikbud	216 peserta didik	243.106.000	DAU		216 peserta didik	243.106.000	
1	1	2	2,01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dindikbud	1214 orang	9.395.196.000	DAU		1108 orang	9.395.196.000	
1	1	2	2,01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dindikbud	140 orang	125.752.000	DAU		66 orang	125.752.000	
1	1	2	2,01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Dindikbud	459 satuan pendidikan	657.000.000	DAU		459 satuan pendidikan	657.000.000	
1	1	2	2,01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Dindikbud	469 satuan pendidikan	65.229.500.000	DAK Non Fisik		469 satuan pendidikan	65.781.255.000	





1	1	2	2,02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud	1.079 orang	3.255.180.000	DAU		568 orang	3.255.180.000	
1	1	2	2,02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Dindikbud	77 satuan pendidikan	3.425.400.000	DAK Non Fisik - DAU		77 satuan pendidikan	3.461.019.000	
1	1	2	2,02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud	6 orang	7.235.000	DAU		260 orang	7.235.000	
1	1	2	2,02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dindikbud	4 ruang	695.000.000	DAK Fisik - DAU		4 ruang	695.000.000	
1	1	2	2,02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dindikbud	4 ruang	35.000.000	DAK Fisik		1 ruang	35.000.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2,03</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Persentase PAUD terakreditasi minimal B</b>		<b>50.5 persen</b>	<b>23.095.544.000</b>			<b>50.5 persen</b>	<b>23.626.344.000</b>	
1	1	2	2,03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Dindikbud	5 unit	1.000.000.000	DAK Fisik - DAU		1 unit	1.000.000.000	
1	1	2	2,03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Dindikbud	20 unit	1.249.776.000	DAK Fisik - DAU		18 unit	1.780.576.000	
1	1	2	2,03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Dindikbud	8 unit	482.513.000	DAU		6 unit	482.513.000	
1	1	2	2,03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Dindikbud	5 paket	41.503.000	DAU		25 paket	41.503.000	

1	1	2	2,03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Dindikbud	30 peserta didik	8.917.000	DAU		30 peserta didik	8.917.000	
1	1	2	2,03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Dindikbud	1625 orang	8.831.928.000	DAU		1489 orang	8.831.928.000	
1	1	2	2,03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dindikbud	3700 orang	88.759.000	DAU		orang	88.759.000	
1	1	2	2,03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dindikbud	3 satuan pendidikan	55.726.000	DAU		3 satuan pendidikan	55.726.000	
1	1	2	2,03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Dindikbud	600 satuan pendidikan	11.336.422.000	DAK Non Fisik		651 satuan pendidikan	11.336.422.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2,04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (pkbm) terakreditasi</b>		<b>50,5 persen</b>	<b>4.818.947.000</b>			<b>50,5 persen</b>	<b>4.818.947.000</b>	
1	1	2	2,04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang			ruang					-	
1	1	2	2,04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Dindikbud	300 peserta didik	221.699.000	DAU		300 peserta didik	221.699.000	
1	1	2	2,04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Dindikbud	38 satuan pendidikan	72.848.000	DAU		38 satuan pendidikan	72.848.000	
1	1	2	2,04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	umlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Dindikbud	18 satuan pendidikan	4.524.400.000	DAK Non Fisik		18 satuan pendidikan	4.524.400.000	
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20</b>		<b>16,73 persen</b>	<b>110.641.000</b>			<b>16,73 persen</b>	<b>110.641.000</b>	

1	1	4	2,01		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>Cakupan PTK bersertifikat</b>		81	person	110.641.000			81	person	110.641.000
1	1	4	2,01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dindikbud	2	laporan	110.641.000	DAU		2	laporan	110.641.000
2	2	2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>					1.858.043.000					1.858.043.000
2	2	2			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Jumlah obyek pemajuan kebudayaan lestari (dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan)</b>		7	objek	931.403.000			7	objek	931.403.000
2	2	2	2,01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah/Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi</b>		6	objek	544.138.000			6	objek	544.138.000
2	22	2	2,01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan			kegiatan							
2	22	2	2,01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dindikbud	10	orang	544.138.000	DAU		20	orang	544.138.000
2	2	2	2,02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah obyek tradisi budaya yang difasilitasi</b>		2	obyek	378.965.000			2	obyek	378.965.000
2	22	2	2,02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek	Jumlah Obyek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	Dindikbud	7	objek	378.965.000	DAU		2	objek	378.965.000

					Pemajuan Tradisi Budaya	Pengembangan dan Pemanfaatan												
2	22	2	2,02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			kegiatan										
2	2	2	2,03		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>persentase Jumlah lembaga adat yang dibina</b>		<b>100 persen</b>	<b>8.300.000</b>				<b>100 persen</b>	<b>8.300.000</b>				
2	22	2	2,03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Dindikbud	1 objek	8.300.000	DAU			1 objek	8.300.000				
2	2	2	4		<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Persentase sejarah lokal yang dilestarikan</b>		<b>70 persen</b>	<b>29.555.000</b>				<b>70 persen</b>	<b>29.555.000</b>				
2	2	2	4	2,01	<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan</b>		<b>3 kegiatan</b>	<b>29.555.000</b>				<b>3 kegiatan</b>	<b>29.555.000</b>				
2	22	4	2,01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Dindikbud	2 orang	29.555.000	DAU			2 orang	29.555.000				
2	2	2	5		<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang diestarikan</b>		<b>15 persen</b>	<b>157.548.000</b>				<b>15 persen</b>	<b>157.548.000</b>				
2	2	2	5	2,01	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan</b>		<b>7 obyek</b>	<b>30.679.000</b>				<b>7 obyek</b>	<b>30.679.000</b>				
2	22	5	2,01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Dindikbud	2 objek	30.679.000	DAU			2 objek	30.679.000				
2	2	2	5	2,02	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah cagar budaya yang dikelola</b>		<b>1 cagar</b>	<b>126.869.000</b>				<b>1 cagar</b>	<b>126.869.000</b>				
2	22	5	2,02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Dindikbud	3 objek	89.028.000	DAU			3 objek	89.028.000				
2	22	5	2,02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Dindikbud	1 objek	37.841.000	DAU			1 objek	37.841.000				
2	2	2	6		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Persentase benda koleksi museum yang dikelola</b>		<b>100 persen</b>	<b>739.537.000</b>				<b>100 persen</b>	<b>739.537.000</b>				



2	2 2	6	2,01		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>	<b>cakupan pengunjung museum</b>		<b>220 orang</b>	<b>739.537.000</b>			<b>220 orang</b>	<b>739.537.000</b>	
2	22	6	2,01	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Dindikbud	100 unit	144.702.000	DAK Non Fisik		100 unit	144.702.000	
2	22	6	2,01	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Dindikbud	1 unit	572.852.000	DAK Non Fisik - DAU		1 unit	572.852.000	
2	22	6	2,01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Dindikbud	4 unit	21.983.000	DAU		4 unit	21.983.000	
						<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>759.573.407.000</b>				<b>780.194.213.000</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat baik itu LSM atau organisasi yang lain tidak ada, yang ada adalah usulan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan yang sudah digabung dengan renja SKPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Adapun tabel usulan dapat dilihat pada tabel T-C 2.5 berikut :

Tabel T-C 2.5

### Usulan Program dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Nama PD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Dusun 1 dan Dusun 4 Desa Kebutuh, Bukateja Kab. Purbalingga	Tersedianya alat kesenian	1 tek - tek	Usulan musrenbang
2	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Bobotsari, Kab. Purbalingga	Tersedianya alat kesenian	1 gamelan	Usulan musrenbang
3	Pemeliharaan benda/tempat cagar budaya	Dusun Tlahab RT 05 RW 05, Kec. Karangreja Kab. Purbalingga	Tersedianya alat kesenian	1 cagar	Usulan musrenbang
4	Pemeliharaan benda/tempat cagar budaya	Desa Serayukaranganyar RT 01 RW 02, Kec. Mrebet Kab. Purbalingga	Tersedianya alat kesenian	1 cagar	Usulan musrenbang
5	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	balai desa kalimanah wetan, Kab. Purbalingga	Tersedianya alat kesenian	1 gamelan	Usulan musrenbang
6	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	Kembaran Kulon rt 2 rw 1, Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga	Tersedianya alat kesenian	1 tek - tek	Usulan musrenbang
7	Pengadaan alat kesenian (gamelan, dll)	desa kramat, Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga	Tersedianya alat kesenian	1 gamelan	Usulan musrenbang
8	Pengadaan sarana prasarana pembelajaran PAUD	RT 01 RW 06, Kab. Purbalingga	Tersedianya alat Peraga PAUD	1 set alat peraga	Usulan musrenbang

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

---

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.**

Target yang telah ditetapkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tidak lepas dari target - target yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan kebijakan Nasional. Target tersebut telah tersaring dari kebijakan nasional ke kebijakan pemerintah daerah, lalu nilai nilai tersebut diadopsi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga untuk menjalankan rencana kerja yang akan ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan Pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga**

Berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ikut berperan untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu “Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia.” Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga berperan mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu Misi yang ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan. Pada misi ke 4 ini Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pencapaian terwujudnya derajat Pendidikan. Visi dan Misi tersebut menjadi target dasar pemeliharaan dan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang dianalisis dari indikator dan target kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yaitu terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas ditunjukkan pada indikator angka harapan lama sekolah dari 12,01 di Tahun 2022 akan ditargetkan menjadi 12,10 di Tahun 2023. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah ditunjukkan pada indikator nilai SAKIP Dindikbud dari 70,01 di Tahun 2022 akan ditargetkan menjadi 70,51 di Tahun 2023.
  - b. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat ditunjukkan pada indikator angka partisipasi sekolah dasar (SD) usia 7-12 tahun dari 99,70 di Tahun 2022 akan ditingkatkan menjadi 99,75 di Tahun 2023.

**Tabel 3.2**

Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2022	Target 2023
Terwujudnya pendidikan untuk semua yang berkualitas		Angka harapan lama sekolah	12,01	12,10
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai SAKIP Dindikbud	70,01	70,51
	Meningkatnya kesempatan	Angka	99,70	99,75

	memperoleh pendidikan bagi masyarakat dan meningkatnya kualitas layanan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan masyarakat	partisipasi sekolah dasar (SD) usia 7-12 tahun		
--	--	--	--	--

2. Berdasarkan Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yaitu terwujudnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan, cagar budaya dan sejarah ditunjukkan pada indikator persentase obyek pemajuan kebudayaan lestari dari 64 di Tahun 2022 akan ditargetkan menjadi 72,7 di Tahun 2023. Adapun sasaran dari tujuan ini adalah :
- a. Meningkatnya kelestarian obyek pemajuan kebudayaan ditunjukkan pada indikator persentase obyek pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai perbup 430/400 tahun 2018 yang dilestarikan/dikembangkan dari 60 di Tahun 2022 akan ditargetkan menjadi 70 di Tahun 2023.
  - b. Meningkatnya pelestarian cagar budaya ditunjukkan pada indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan pada angka 15 di Tahun 2022 dan akan dipertahankan di Tahun 2023.

### 3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C 3.3)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	INDIKATOR KEGIATAN / PROGRAM	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
1	01				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>				<b>765.574.318.000</b>		<b>765.574.318.000</b>		
1	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>571.330.666.000</b>		<b>571.330.666.000</b>		
1	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>2.440.000</b>		<b>2.440.000</b>		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kab.P urbalin gga	1 dokum en	1.245.000	DAU		1 dokum en	1.245.000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Pu rbaling ga	2 dokum en	1.245.000	DAU		2 dokum en	1.245.000
1	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>570.014.104.000</b>		<b>570.014.104.000</b>		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu		3217 ASN	568.982.260.000	DAU		3217 ASN	568.982.260.000
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya tugas ASN dan terlayannya kebutuhan operasional Koorwilcam		100 orang kali (OK) 18 korwil cam	721.239.000	DAU		100 orang kali (OK) 18 korwilc am	721.239.000

1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas ASN	Tersusunnya dokumen akuntansi yang berkualitas		1000 dokumen	310.605.000	DAU		1000 dokumen	310.605.000
1	01	01	2.03		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>188.107.000</b>				<b>188.107.000</b>
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen laporan penatausahaan BMD		12 laporan	188.107.000	DAU		12 laporan	188.107.000
1	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>300.000.000</b>				<b>300.000.000</b>
1	01	01	2.05	09	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan		250 orang kali (OK)	300.000.000	DBH CHT		250 orang kali (OK)	300.000.000
1	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>51.991.000</b>				<b>51.991.000</b>
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik		1 paket	2.280.000	DAU		1 paket	2.280.000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		12 bulan	32.133.000	DAU		12 bulan	32.133.000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat		12 bulan	16.582.000	DAU		12 bulan	16.582.000
1	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>12.451.000</b>				<b>12.451.000</b>
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		6 jenis	12.451.000	DAU		6 jenis	12.451.000
1	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>575.429.000</b>				<b>575.429.000</b>
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materai, dan jasa pos/pengiriman		12 bulan	801.000	DAU		12 bulan	801.000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi		12 bulan	175.404.000	DAU		12 bulan	175.404.000
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	7.232.000	DAU		12 bulan	7.232.000

1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor		12 bulan	391.992.000	DAU		12 bulan	391.992.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>186.094.000</b>	DAU			<b>186.094.000</b>
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas		8 Mobil 30 motor 8 Mobil 30 motor	124.508.000	DAU		8 Mobil 30 motor 8 Mobil 30 motor	124.508.000
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja		12 bulan	17.742.000	DAU		12 bulan	17.742.000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor		1 unit	43.844.000	DAU		1 unit	43.844.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>				<b>194.133.011.000</b>				<b>194.133.011.000</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>				<b>128.551.071.000</b>				<b>128.551.071.000</b>
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru /Kepala sekolah/TU	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun		20 ruang	398.742.000	DAK		20 ruang	398.742.000
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun		20 ruang	604.482.000	DAK		20 ruang	604.482.000
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun		10 ruang	2.572.739.000	DAK		10 ruang	2.572.739.000
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang di rehab		30 ruang	1.884.014.000	DAK		30 ruang	1.884.014.000



1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab	100 ruang	2.984.100.000	DAK DAU		100 ruang	2.984.100.000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	300 set	88.338.000	DAU		300 set	88.338.000
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik SD yang menerima bea siswa	1.850 siswa	1.103.874.000	DAU		1.850 siswa	1.103.874.000
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	90 paket	39.134.527.000	DAK		90 paket	39.134.527.000
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk penyusunan kurikulum sekolah model	469 sekolah	82.164.000	DAU		469 sekolah	82.164.000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan	72 peserta	143.106.000	DAU		72 peserta	143.106.000
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi	2183 orang	9.395.196.000	DAU		2183 orang	9.395.196.000
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dibina	90 sekolah	25.752.000	DAU		90 sekolah	25.752.000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah sekolah dasar yang difasilitasi	469 sekolah	65.424.755.000	DAK Non Fisik		469 sekolah	65.424.755.000

1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS	469 sekolah	103.120.000	DAU		469 sekolah	103.120.000
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun	50 ruang	4.606.162.000	DAK		50 ruang	4.606.162.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			<b>39.269.035.000</b>				<b>39.269.035.000</b>
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	1 sekolah	3.000.000.000	DAU		1 sekolah	3.000.000.000
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/tu	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun	4 ruang	450.256.000	DAK		4 ruang	450.256.000
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun	6 ruang	1.062.520.000	DAK		6 ruang	1.062.520.000
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang terbangun	6 ruang	1.319.208.000	DAK		6 ruang	1.319.208.000
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium yang terbangun	5 ruang	499.700.000	DAK		5 ruang	499.700.000
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	6 unit	1.453.342.000	DAU DAK		6 unit	1.453.342.000
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	6 unit	10.484.486.000	DAK		6 unit	10.484.486.000

1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang direhab	6 ruang	1.371.130.000	DAK		6 ruang	1.371.130.000
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang direhab	6 ruang	76.164.000	DAK		6 ruang	76.164.000
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab	5 ruang	927.864.000	DAK		5 ruang	927.864.000
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhab	6 ruang	6.074.810.000	DAK		6 ruang	6.074.810.000
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhab	6 unit	1.021.492.000	DAK		6 unit	1.021.492.000
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	180 set	63.083.000	DAK		180 set	63.083.000
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik SMP yang menerima beasiswa	70 anak	5.646.000	DAU		70 anak	5.646.000
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga siswa	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia	86 set	2.222.005.000	DAK		86 set	2.222.005.000
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajata dan ujian sekolah	20.688 siswa	166.839.000	DAU		20.688 siswa	166.839.000

1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan Pendidikan menengah yang siap dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi	20 sekolah	77.664.000	DAU		20 sekolah	77.664.000
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan	20 peserta	112.941.000	DAU		20 peserta	112.941.000
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns yang tersedia	1.079 orang	3.255.180.000	DAU		1.079 orang	3.255.180.000
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mengelola Dana BOS	Sekolah	4.190.319.000	DAK Non Fisik		Sekolah	4.190.319.000
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS	77 orang	7.235.000	DAU		77 orang	7.235.000
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang direhab	3 unit	1.239.473.000	DAK		3 unit	1.239.473.000
1	01	02	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang kepala sekolah yang direhab	2 unit	187.678.000	DAK		2 unit	187.678.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			<b>22.528.258.000</b>				<b>22.528.258.000</b>

1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru yang dibangun	1 unit	168.282.000			1 unit	168.282.000
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana prasarana dan utilitas PAUD yang dibangun	40 unit	880.017.000	DAK		40 unit	880.017.000
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru yang direhab	2 unit	53.141.000	DAU		2 unit	53.141.000
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang direhab	5 unit	1.077.513.000	DAU		5 unit	1.077.513.000
1	01	02	2.03	14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia	2 paket	112.753.000			2 paket	112.753.000
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	30 anak	8.917.000	DAU		30 anak	8.917.000
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns yang tersedia	1.555 orang	8.831.928.000	DAU		1.555 orang	8.831.928.000

1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan dan dan peningkatan kompetensi		3.700 orang	88.759.000	DAU		3.700 orang	88.759.000
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan pembinaan		3 PAUD	55.726.000	DAU		3 PAUD	55.726.000
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP		600 PAUD	11.251.222.000	DAU		600 PAUD	11.251.222.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>				<b>3.784.647.000</b>				<b>3.784.647.000</b>
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan		300 orang	121.699.000	DAU		300 orang	121.699.000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dibina		38 satuan pendidikan	72.848.000	DAU		38 satuan pendidikan	72.848.000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP nonformal/kesetaraan		8 satuan pendidikan	3.590.100.000	DAK Non Fisik		8 satuan pendidikan	3.590.100.000
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				<b>110.641.000</b>				<b>110.641.000</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>				<b>110.641.000</b>				<b>110.641.000</b>

1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan pada SD, SMP dan PAUD		2 laporan	110.641.000	DAU		2 laporan	110.641.000
2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
2	22				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>				<b>1.333.043.000</b>				<b>1.333.043.000</b>
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>				<b>406.403.000</b>				<b>406.403.000</b>
2	22	02	2.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>269.138.000</b>				<b>269.138.000</b>
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan		7 obyek	269.138.000	DAU		7 obyek	269.138.000
2	22	02	2.02		<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>128.965.000</b>				<b>128.965.000</b>
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan		7 obyek	128.965.000	DAU		7 obyek	128.965.000
2	22	02	2.03		<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>8.300.000</b>				<b>8.300.000</b>
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan		1 obyek	8.300.000	DAU		1 obyek	8.300.000
2	22	04			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>				<b>29.555.000</b>				<b>29.555.000</b>
2	22	04	2.01		<b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>29.555.000</b>				<b>29.555.000</b>
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah	Jumlah sumber daya manusia dan Lembaga sejarah lokal		2 orang	29.555.000	DAU		2 orang	29.555.000

					Lokal Kabupaten/Kota								
2	22	05			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>				<b>157.548.000</b>				<b>157.548.000</b>
2	22	05	2.01		<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>				<b>30.679.000</b>				<b>30.679.000</b>
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan		7 obyek	30.679.000	DAU		7 obyek	30.679.000
2	22	05	2.02		<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>				<b>126.869.000</b>				<b>126.869.000</b>
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi		3 obyek	89.028.000	DAU		3 obyek	89.028.000
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang dimanfaatkan		1 obyek	37.841.000	DAU		1 obyek	37.841.000
2	22	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>				<b>739.537.000</b>				<b>739.537.000</b>
2	22	06	2.01		<b>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</b>				<b>739.537.000</b>				<b>739.537.000</b>
2	22	06	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dikonservasi		100 koleksi	144.702.000	DAK Non Fisik		100 koleksi	144.702.000
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dan akses museum		220 orang	572.852.000	DAK Non Fisik		220 orang	572.852.000
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara		4 unit	21.983.000	DAU		4 unit	21.983.000
<b>TOTAL</b>								<b>766.907.361.000</b>				<b>766.907.361.000</b>	



## **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

Memberantas kemiskinan merupakan tujuan pertama diciptakannya program Sustainable Development Goals (SDGs). Adapun program yang direncanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberantas kemiskinan meliputi pengelolaan dana pada Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, PAUD, dan Non Formal/Kesetaraan pada sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik;
2. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
3. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;
4. Pengelolaan Dana BOS;

Diharapkan dengan adanya keempat sub kegiatan tersebut, peserta didik dapat terus lanjut bersekolah dan mengurangi angka putus sekolah karena kemiskinan. Karena dengan mengenyam pendidikan yang baik, sumber daya manusia dapat mempunyai harapan untuk masa depannya meskipun pendapatan keluarga mereka terbilang kurang.

Point SDGs pada point 1 dan 4 yaitu 1. Menghapus Kemiskinan dan 4. Pendidikan yang berkualitas sudah termasuk dalam program kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan Prioritas Pembangunan Provinsi yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga sudah sesuai dengan Prioritas Pembangunan Nasional yaitu untuk mencapai sumber daya yang unggul.

Pencapaian NSPK dan SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga terus ditingkatkan. Norma standar, prosedur dan kriteria (NSPK) disusun untuk memperjelas urusan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperjelas standar pelayanan minimal (SPM) sebagai upaya pemberian pelayanan yang tepat kepada masyarakat. NSPK yang telah ditetapkan Kemendikbud berupa hasil belajar siswa secara holistic melalui enam Profil Pelajar Pancasila . Program Sekolah Penggerak terfokus pada pengembangan SDM sekolah, mulai dari siswa, guru sampai kepala sekolah. Program Sekolah Penggerak menurut Syaiful Huda bukan membedakan antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Namun tetap memantau pelaksanaan di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi. Adapun komitmen yang diberikan pemerintah pusat terhadap Pemerintah Daerah adalah mulai dari SDM Sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi dan pendampingan pemerintah daerah. Sekolah Penggerak adalah mengubah

proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM. Program Sekolah Penggerak terdiri dari lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendampingan konsultatif dan asimetris, dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan Program Sekolah Penggerak. Kemudian, UPT Kemendikbud di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan kepada pemda selama implementasi program. Seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencari solusi jika terjadi kendala di lapangan.
- 2) Melakukan penguatan terhadap SDM sekolah yang melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud.
- 3) Melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yakni merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

Adapun perencanaan berbasis data

- 4) Menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah di mana yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan.
- 5) Digitalisasi sekolah yaitu penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan

Jika rumusan program tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya maka akan ditindaklanjuti kembali untuk perevisian dana dan kegiatan, dikarenakan diharuskan ada beberapa kesesuaian yang akan berubah berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan kegiatan kebudayaan yang tidak mungkin berubah secara cepat. Jika ada yang diubah diharuskan adanya kembali sosialisasi baik melalui surat edaran, atau melalui zoom meeting, dan juga akan dipertimbangkan beberapa saran dari pihak sekolah-sekolah dan pihak yang berwenang dan berkaitan.

## **Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Program utama yang tetap dipertahankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga adalah 7 (tujuh) program yaitu;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pembinaan Sejarah
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Pengelolaan Permuseuman

Program pengelolaan pendidikan merupakan segala urusan yang berhubungan dengan terselenggarakannya proses belajar yang lancar dan efektif. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang program ini adalah;

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
6. Pengadaan Mebel Sekolah
7. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
8. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
9. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
10. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
11. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
12. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
13. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
14. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
15. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar.

## 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penambahan Ruang Kelas Baru
2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
5. Pembangunan Laboratorium
6. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
10. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
11. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
12. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
13. Pengadaan Mebel Sekolah
14. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
15. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
16. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
17. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
18. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
19. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
20. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
21. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
22. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
23. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah

## 3. Pengelolaan Pendidikan PAUD

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan PAUD terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
5. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
6. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
7. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
8. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
9. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
10. Pengelolaan Dana BOP PAUD

#### 4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
2. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
3. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Terdapat dua fokus utama yaitu kepada peserta didik (penyediaan biaya personil peserta didik, penyelenggaraan proses belajar dan ujian, dan pengelolaan dana BOS, dan pengelolaan sarana prasana sekolah). Hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan SDGs untuk memberantas kemiskinan agar siapapun dapat sekolah dan mengurangi bahkan menghilangkan angka putus sekolah dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia.

Fokus terhadap tenaga pendidik juga dipertimbangkan melalui Prpgram Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sub kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Program Pengembangan Kebudayaan memiliki 3 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Selain itu bidang kebudayaan Kabupaten Purbalingga juga tidak luput perhatiannya

terhadap museum, ataupun cagar budaya dan sejarah yang sudah ada. Program yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan Sejarah dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota. Adapun Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk permuseuman akan dilaksanakan Program Pengelolaan Museum dengan Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Hal tersebut untuk menunjang kelancaran urusan administrasi bidang perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Selain memiliki kegiatan perencanaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga memiliki kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk mengatur kelancaran proses keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Rincian sub kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah menyediakan peralatan rumah tangga dan logistic kantor. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah menyediakan biaya untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah adalah menunjang pengelolaan barang milik daerah yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sub unitnya. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk menyediakan jasa surat menyurat, jasa listrik, internet dan lain-lain untuk kebutuhan kantor. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah menyediakan dana untuk pemeliharaan kendaraan, gedung dan peralatan kantor.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

---

#### **4.1 Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan Yang direncanakan**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga akan dibagi menjadi tujuh point besar untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan. Adapun program untuk Urusan Pendidikan diprioritaskan menjadi dua program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan, dan Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan. Untuk Urusan Kebudayaan akan di bagi menjadi beberapa program, yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, dan Program Pengelolaan Permuseuman. Disamping program-program tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pendanaan Urusan Pendidikan akan lebih difokuskan kepada Program Pengelolaan Pendidikan yang memiliki prioritas lebih tinggi yaitu total pagu sejumlah Rp.194.133.011.000,00. dibanding Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki total dana sejumlah Rp.110.641.000,00. Hal tersebut demi tercapainya target nasional, target provinsi, dan target Kabupaten Purbalingga untuk ‘Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.’

Program Pengelolaan Pendidikan untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dikhususkan untuk membangun/memperbaiki sarana prasarana sekolah. Sedangkan pendanaan pendukung untuk ‘Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta didik, dan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik, ataupun Pembinaan Minat, Bakat, Siswa

Program untuk Urusan Kebudayaan dibagi menjadi 4 program prioritas yaitu Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Program Pembinaan Sejarah dan Program Pengelolaan Permuseuman. Adapun pendanaan lebih berfokus kepada program pengembangan kebudayaan yang memiliki dana sebesar Rp. 406.403.000,00. dengan Rencana Kerja berupa ‘Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota’. Sedangkan untuk Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya mendapat dana

kelola sebesar Rp.157.548.000,00. Dan untuk Program Pengelolaan Permuseuman mendapat dana sebesar Rp.739.537.000,00.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah juga mendapatkan perhatian. Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mendapatkan dana sebesar Rp.2.490.000,00. Bidang Administrasi Keuangan Perangkat daerah mendapatkan dana sebesar Rp.570.014.104.000,00. Administrasi Umum Perangkat Daerah mendapatkan dana sebesar Rp.51.991.000,00. Bidang Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah mendapatkan dana sebesar Rp.188.107.000,00. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mendapatkan dana sebesar Rp.300.000.000,00. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendapatkan dana kelola sebesar Rp.575.429.000,00. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah mendapatkan dana sebesar Rp.186.094.000,00.

Indikator yang akan dicapai melalui pelaksanaan program-program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

#### 1. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Indikator yang akan dicapai yaitu : APK dan APM SD/SDLB/MI/Paket A, APK dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B, Cakupan Akreditasi SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan capaian SPM SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan angka kelulusan SD/ sederajat/ SMP/ sederajat, cakupan angka melanjutkan SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan angka putus sekolah SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan angka mengulang SD/ sederajat/SMP/ sederajat, cakupan satuan pendidikan yang menerapkan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Indikator yang akan dicapai yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 5-6 tahun dan cakupan guru PAUD memenuhi kualifikasi, cakupan akreditasi PAUD
3. Indikator yang akan dicapai yaitu “Cakupan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang terakreditasi dan cakupan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang terakreditasi.

#### 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator yang akan dicapai yaitu jumlah pendidik / tenaga kependidikan berprestasi tingkat provinsi dan nasional, cakupan tingkat kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, cakupan sertifikasi pendidik, cakupan pendidik lulus ujian kompetensi guru (UKG).

#### 3. Program Pengembangan Kebudayaan.



Indikator yang akan dicapai yaitu : Cakupan Kajian Seni, Cakupan Fasilitas Seni, Cakupan Gelar Seni, Cakupan Misi Kesenian, Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, Cakupan Gelar Seni, Cakupan Organisasi Kesenian yang Aktif

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Indikator yang dicapai yaitu : jumlah juru pelihara cagar budaya, jumlah cagar budaya , dan cakupan cagar budaya yang dikonservasi.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Indikator yang dicapai yaitu : kunjungan museum dan monument.

6. Program Pembinaan Sejarah

Indikator yang dicapai yaitu : persentase sejarah local yang dilestarikan

**Tabel 4.1**

**Program Kerja dan Indikator Kinerja**

No	Program Kerja	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun dalam Pendidikan dasar dan warga negara usia 13 – 15 tahun dalam pendidikan menengah	99,75 %  95,77 %
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase SD dan SMP dengan rasio guru diatas 20	14,62 %
4	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	70 %
5	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah local yang dilestarikan	70 %
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	15 %
7	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase nemda koleksi museum yang dikelola	100 %

**Tabel 4.2**

**Kegiatan dan Indikator Kegiatan**

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Sumber Dana
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas	100	DAU
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	DAU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	DAU
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas	100	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	DAU
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SD	62	DAU dan DAK
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian SNP (standar Nasional Pendidikan) SMP	62	DAU dan DAK
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase PAUD terakreditasi minimal B	50,50	DAU dan DAK
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (PKBM) terakreditasi	50,50	DAU dan DAK
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas	Cakupan PTK bersertifikat	81	DAU

	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang difasilitasi	6	DAU
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tradisi budaya yang difasilitasi	2	DAU
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah lembaga adat yang dibina	100	DAU
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>			
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan	3	DAU
<b>6</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	7	DAU
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dikelola	1	DAU
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>			
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Cakupan pengunjung museum	220	DAU dan DAK

**Tabel 4.3**

**Sub Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan**

No	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	2 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	4.286 orang

		secara tepat waktu	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya tugas ASN dan terlayannya kebutuhan operasional Koorwilcam	100 orang kali (OK) 18 korwilcam
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya dokumen akuntansi yang berkualitas	1.000 dokumen
	<b><i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i></b>		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya dokumen laporan penatausahaan BMD	12 laporan
	<b><i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i></b>		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	250 orang kali (OK)
	<b><i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i></b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	1 paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	12 bulan
	<b><i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	12 bulan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	12 bulan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan
	<b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas	8 Mobil 30 motor 8 Mobil 30 motor
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	12 bulan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		

	<b><i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i></b>		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang terbangun	20 ruang
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun	20 ruang
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah ruang perpustakaan yang terbangun	10 ruang
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah ruang kelas yang di rehab	30 ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah ruang kelas yang direhab	100 ruang
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel yang tersedia	300 set
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik SD yang menerima bea siswa	1.850 siswa
	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga siswa yang tersedia	90 paket
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk penyusunan kurikulum sekolah model	469 sekolah
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan	72 peserta
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi	2183 orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah dasar yang dibina	90 sekolah
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah sekolah dasar yang difasilitasi	469 sekolah
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS	469 sekolah
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah ruang laboratorium yang terbangun	50 ruang
	<b><i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i></b>		
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	1 sekolah
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang dibangun	4 ruang
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang terbangun	6 ruang

	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang terbangun	6 ruang
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah laboratorium yang terbangun	5 ruang
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang terbangun	6 unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	6 unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah ruang guru yang direhab	6 ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang UKS yang direhab	6 ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang direhab	5 ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah laboratorium yang direhab	6 ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhab	6 unit
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	180 set
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik SMP yang menerima beasiswa	70 anak
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktek dan peraga siswa yang tersedia	86 set
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa yang mengikuti proses belajarnya dan ujian sekolah	20.688 siswa
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan Pendidikan menengah yang siap dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi	20 sekolah
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah lomba minat, bakat dan kreativitas siswa yang dilaksanakan	20 peserta
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns yang tersedia	1.079 orang
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mengelola Dana BOS	Sekolah
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah tenaga pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan dana BOS	77 orang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah ruang TU yang direhab	3 unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah ruang kepala sekolah yang direhab	2 unit
	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</i>		

	<b>(PAUD)</b>		
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru yang dibangun	1 unit
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana prasarana dan utilitas PAUD yang dibangun	40 unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah gedung/ruang kelas/ruang guru yang direhab	2 unit
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas PAUD yang direhab	5 unit
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga siswa PAUD yang tersedia	2 paket
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar	30 anak
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan non pns yang tersedia	1.555 orang
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat fasilitas kenaikan pangkat/golongan dan dan peningkatan kompetensi	3.700 orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan pembinaan	3 PAUD
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mengelola dana BOP	600 PAUD
	<b><i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i></b>		
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan	300 orang
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang dibina	38 satuan pendidikan
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah nonformal/kesetaraan yang mengelola dana BOP nonformal/kesetaraan	8 satuan pendidikan
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		
	<b><i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i></b>		
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan pada SD,	2 laporan

		SMP dan PAUD	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		
	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	7 obyek
	<i>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	7 obyek
	<i>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	1 obyek
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		
	<i>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan Lembaga sejarah lokal	2 orang
<b>6</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>		
	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>		
	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	2 orang
	<i>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>		
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang dilindungi	3 obyek
	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah obyek cagar budaya yang dimanfaatkan	1 obyek
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>		
	<i>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</i>		
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi museum yang dikonservasi	100 koleksi
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan dan akses museum	220 orang



	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah sarana dan prasarana museum yang tersedia dan terpelihara	4 unit
--	---	--	--------

## BAB V

### PENUTUP

---

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 menjamin program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif Renja selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2023, dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2023. Sebagaimana RKPD Tahun 2023, Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19, diantaranya penurunan pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan daerah, potensi meningkatnya jumlah pengangguran.

Ketersediaan sumber daya diharapkan bisa terpenuhi seiring membaiknya kondisi pandemi. Beberapa strategi untuk pencapaian output yang lebih optimal antara lain:

1. Optimalisasi biaya operasional sekolah baik dari pusat maupun daerah
2. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait
3. Efektivitas dan penggunaan teknologi dalam penyelesaian pekerjaan

Untuk itu diperlukan kerja cerdas dan upaya bersama semua pemangku kepentingan dalam melewati tantangan diatas.

Selanjutnya apabila terdapat keterbatasan anggaran yang tidak dapat mengakomodir seluruh program/kegiatan dalam Renja Tahun 2023, maka program/kegiatan yang disusun dalam RKA Tahun 2023 didasarkan pada skala prioritas. Sedangkan program/kegiatan yang tidak dapat dianggarkan di Tahun 2023, dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Purbalingga, 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



TRI GUNAWAN SETYADI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004